

Etnisitas sebagai Politik Penguasaan Sumber Daya: Perspektif Teori Elit dalam Ekonomi-Politik Pedesaan Indonesia

Komang Ariyanto^{1*}, Faizal Rohmiani², Rahmawati Rahayu³, Sofyan Sjaf⁴

^{1,2,4}Program Studi Sosiologi Pedesaan, IPB University, Indonesia

³Program Studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, IPB University, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : komangariyanto998@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 06 Juni, 2026

Page: 1359-1371

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i6.2286>

Article History:

Received: Mei 02, 2026

Revised: Mei 23, 2026

Accepted: Juni 19, 2026

Abstract : *This study analyses the relationship between ethnicity, patronage, and resource control within rural Indonesia's social structure using Elite Theory. It starts from the view that ethnicity in post reform Indonesian rural society functions not only as cultural identity, but also as a political instrument mobilised by local elites to maintain economic domination and power. Decentralisation and regional autonomy have enabled local oligarchies through patronage based on ethnicity, kinship, and clientelism. This research uses a qualitative critical essay approach with political economy analysis. Data came from literature review of scholarly articles, academic books, and policy documents, analysed descriptively and critically using qualitative content analysis. The findings show that local elites use ethnic symbols, native son narratives, and customary legitimacy as social closure mechanisms to monopolise access to land, the Village Fund, agrarian resources, and development projects. This article affirms urgent agrarian reform, transparent village governance, citizen participation, and socially just development to limit the reproduction of elite power in rural areas.*

Keywords: *Rural Political Economy; Ethnicity; Patronage; Resource Control; Elite Theory*

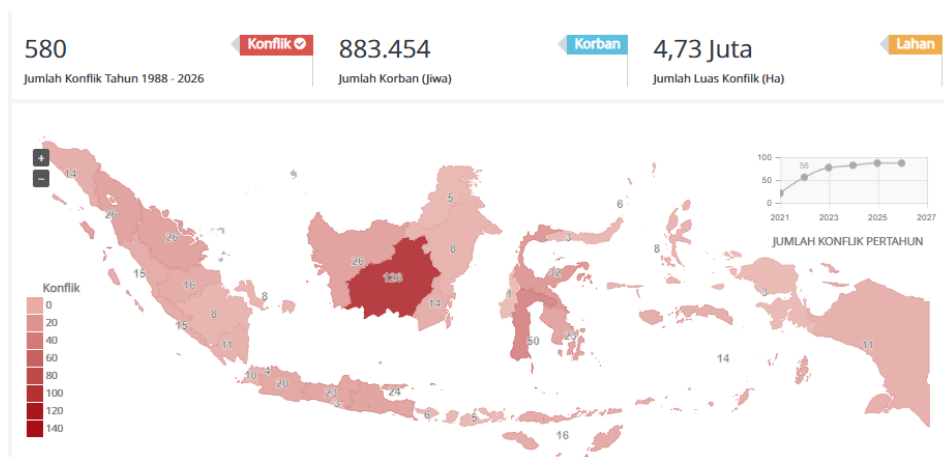
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara etnisitas, patronase, dan penguasaan sumber daya dalam struktur sosial pedesaan Indonesia melalui perspektif Teori Elit. Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa etnisitas dalam pedesaan pascareformasi tidak hanya berfungsi sebagai identitas kultural, tetapi juga sebagai instrumen politik yang dimobilisasi elit lokal untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan kekuasaan. Desentralisasi dan otonomi daerah membuka ruang bagi konsolidasi oligarki lokal melalui patronase berbasis etnis, kekerabatan, dan klientelisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis esai kritis dengan analisis ekonomi politik. Data diperoleh melalui kajian literatur terhadap artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang dianalisis secara deskriptif kritis menggunakan qualitative content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa elit lokal memanfaatkan simbol etnis, narasi putra daerah, dan legitimasi adat sebagai mekanisme social closure untuk memonopoli akses terhadap tanah, Dana Desa, sumber daya agraria, dan proyek pembangunan. Artikel ini menegaskan pentingnya reforma agraria, transparansi tata kelola desa, partisipasi warga, dan pembangunan

berbasis keadilan sosial untuk membatasi reproduksi kekuasaan elit di pedesaan.

Kata Kunci: Ekonomi-Politik Pedesaan; Etnisitas; Patronase; Penguasaan Sumber Daya; Teori Elit

PENDAHULUAN

Konstelasi sosiologi politik kontemporer di Indonesia menunjukkan bahwa etnisitas mengalami transformasi fundamental pasca penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Etnisitas tidak lagi dapat dipahami sebagai identitas primordial yang bersifat statis dan diwariskan secara alamiah, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen politik yang cair, fleksibel, dan dapat dimobilisasi sesuai kepentingan ekonomi-politik aktor tertentu (Berenschot, 2018). Dalam konteks pedesaan Indonesia, dinamika ini semakin menegaskan bahwa identitas etnis bukan sekadar representasi kebudayaan, tetapi telah menjadi arena perebutan legitimasi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya material. Oleh karena itu, relasi antara etnisitas, kekuasaan, dan penguasaan sumber daya menjadi isu sentral dalam diskursus sosiologi pedesaan kontemporer (Sunito *et al.*, 2017; Sjaf, 2019). Dalam perspektif ini, etnisitas bekerja sebagai “politicized culture” sebagaimana dijelaskan oleh Siniša Malešević, yakni kebudayaan yang secara sengaja dipolitisasi dan dimobilisasi oleh elit untuk memperoleh legitimasi, dukungan massa, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi-politik (Malešević, 2004:4). Proses politisasi tersebut memperlihatkan bagaimana simbol-simbol budaya, narasi kedaerahan, dan identitas kolektif digunakan sebagai modal kekuasaan yang konkret untuk membangun dominasi sosial dan memperkuat struktur patronase lokal (Sjaf, 2017; Aspinall & Berenschot, 2019).



Gambar 1. Peta persebaran konflik tanah di Indonesia (1998-2026)
Sumber: *Tanahkita.id*

Sejak tahun 1998-2026, tercatat di Indonesia telah mengalami konflik tanah sebanyak 580 konflik pada lahan seluas 4,73 juta hektar. Lebih buruk, konflik tersebut juga telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 883.454 jiwa. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan kasus konflik tanah terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang merepresentasikan kompleksitas struktur penguasaan tanah yang lebih berpihak kepada rakyat dengan korporasi sebagai aktor dominan dalam penguasaan lahan. Ketimpangan struktur kepemilikan tanah menjadi akar utama dari konflik agraria yang terjadi. Dalam dua dekade terakhir, ekspansi besar-besaran perkebunan sawit berlangsung dan menyebabkan perubahan drastis dalam struktur penguasaan tanah di provinsi ini. Pemerintah pusat dan daerah memberikan izin konsesi dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan-perusahaan besar, yang sering kali tumpang tindih dengan tanah adat, tanah ulayat, maupun tanah garapan masyarakat lokal. Ketimpangan ini merupakan produk dari sejarah panjang sistem agraria Indonesia yang tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan kolonialisme dan logika kapitalisme agraria kontemporer. Ketika penguasaan tanah dalam skala besar diberikan kepada korporasi

melalui mekanisme legal seperti HGU, sementara masyarakat lokal kehilangan akses terhadap lahan, maka lahirlah ketidakadilan struktural yang memicu berbagai bentuk perlawanan dan konflik terbuka.

Dalam konteks Indonesia pascareformasi, desentralisasi membuka ruang yang luas bagi munculnya elit-elit lokal baru yang berkompetisi memperebutkan sumber daya politik dan ekonomi di tingkat daerah maupun desa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan demokratisasi substantif, tetapi justru memfasilitasi konsolidasi oligarki lokal melalui jaringan patronase berbasis identitas etnis, agama, maupun kekerabatan (V. Hadiz *et al.*, 2004; V. Hadiz, 2010; Winters, 2011). Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia sering kali berjalan berdampingan dengan praktik klientelisme dan eksklusivitas sosial yang dilegitimasi melalui politik identitas (Winters, 2016). Dalam situasi tersebut, etnisitas menjadi instrumen yang efektif untuk membangun loyalitas politik, menciptakan solidaritas semu, sekaligus menyingkirkan kelompok lain dari akses terhadap sumber daya strategis. Dengan demikian, politik identitas di pedesaan tidak dapat dilepaskan dari logika ekonomi-politik yang menempatkan identitas sebagai alat akumulasi kekuasaan dan modal (V. R. Hadiz & Robison, 2012; Berenschot, 2018).

Fenomena tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan meningkatnya nilai ekonomi sumber daya desa pasca implementasi Dana Desa, perluasan investasi ekstraktif, dan penguatan otonomi lokal. Desa kini tidak lagi dipandang sebagai ruang sosial tradisional yang homogen, tetapi sebagai arena kompetisi ekonomi-politik yang melibatkan negara, pasar, dan elit lokal (Peluso & Lund, 2011; T. M. Li, 2014). Dalam arena ini, elit desa memanfaatkan simbol-simbol etnis untuk membangun mekanisme eksklusivitas terhadap kelompok tertentu demi mempertahankan dominasi atas tanah, aset desa, konsesi sumber daya alam, dan distribusi anggaran pembangunan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa batas-batas etnis tidak bersifat alamiah, melainkan sengaja dikonstruksi sebagai instrumen “social closure” guna membedakan siapa yang berhak dan tidak berhak mengakses sumber daya publik (Barth, 1998; Malešević, 2004). Dengan demikian, etnisitas bekerja bukan sebagai ruang ekspresi budaya semata, melainkan sebagai perangkat politik untuk mempertahankan relasi kuasa yang timpang di pedesaan Indonesia.

Analisis terhadap fenomena politik penguasaan sumber daya berbasis etnisitas telah berkembang cukup luas dalam kajian ekonomi-politik dan sosiologi politik. Sejumlah studi menggunakan Teori Elit untuk menjelaskan bagaimana kelompok dominan memanfaatkan identitas kolektif guna mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan distribusi sumber daya (Bottomore, 1993; Higley & Burton, 2006). Dalam konteks Indonesia, kajian V. R. Hadiz & Robison (2012) menyoroti bagaimana oligarki pascareformasi memanfaatkan populisme dan politik identitas sebagai instrumen reproduksi kekuasaan kapitalistik. Sementara itu, Berenschot (2018) menunjukkan bahwa klientelisme lokal di Indonesia bekerja melalui jaringan sosial berbasis identitas yang memungkinkan elit mempertahankan loyalitas politik masyarakat. Di sisi lain, studi Palmier (1955) mengenai Bapakisme memperlihatkan bahwa relasi patron-klien dan asimetri pengetahuan antara elit dan massa telah lama menjadi fondasi struktur kekuasaan di Indonesia. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut cenderung beroperasi pada level makro-politik atau berfokus pada dinamika elektoral nasional dan regional, sehingga belum secara mendalam menjelaskan bagaimana etnisitas dimobilisasi dalam praktik penguasaan sumber daya di tingkat mikro-pedesaan. Penelitian mengenai politik identitas di desa umumnya juga lebih banyak menekankan konflik horizontal antar kelompok etnis, sementara dimensi ekonomi-politik penguasaan aset publik oleh elit lokal masih relatif terbatas (Tadjoeddin, 2007; Davidson *et al.*, 2010). Dengan demikian, terdapat kesenjangan teoritis yang signifikan terkait sintesis antara Teori Elit, patronase Bapakisme, dan ekonomi-politik etnisitas dalam konteks pedesaan Indonesia kontemporer.

Kesenjangan literatur tersebut menjadi penting karena realitas di pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa elit lokal secara aktif melakukan instrumentalisasi batas-batas etnis untuk mempertahankan dominasi atas sumber daya publik. Dalam perspektif Barthian boundaries, batas etnis bukanlah entitas budaya yang tetap, melainkan hasil konstruksi sosial yang sengaja diproduksi untuk membedakan antara “kita” dan “mereka” (Barth, 1998). Elit lokal memanfaatkan

konstruksi tersebut untuk menciptakan mekanisme pembatasan sosial yang memungkinkan monopoli terhadap tanah ulayat, distribusi Dana Desa, jabatan birokrasi, hingga akses terhadap proyek pembangunan dan konsesi sumber daya alam (Malešević, 2004; Sunito *et al.*, 2017; Sjaf, 2019). Dalam praktiknya, narasi “putra daerah”, solidaritas kesukuan, dan klaim adat sering kali digunakan untuk menutupi praktik akumulasi modal dan eksploitasi sumber daya oleh kelompok tertentu. Politik identitas tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi massa, tetapi juga sebagai mekanisme ideologis untuk menormalisasi ketimpangan sosial di pedesaan. Akibatnya, masyarakat petani dan kelompok subordinat menerima ketimpangan akses terhadap sumber daya sebagai sesuatu yang dianggap wajar demi kepentingan kolektif etnis tertentu (Tadjoeddin, 2007; T. M. Li, 2014). Situasi ini memperlihatkan bahwa dominasi elit lokal tidak semata-mata dibangun melalui kekuatan ekonomi, tetapi juga melalui manipulasi simbolik atas identitas budaya dan sentimen primordial.

Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini berupaya mendekonstruksi relasi antara etnisitas, patronase, dan penguasaan sumber daya melalui pendekatan Teori Elit. Fokus utama tulisan ini adalah membedah bagaimana elit lokal memobilisasi identitas etnis untuk mengamankan akumulasi modal ekonomi-politik di tingkat desa. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis budaya dan ekonomi-politik, tulisan ini mengintegrasikan perspektif instrumentalist dan culturalist dalam melihat etnisitas. Perspektif instrumentalist memandang etnisitas sebagai alat manipulasi elit demi keuntungan ekonomi-politik, sedangkan perspektif culturalist menekankan fungsi simbol budaya sebagai perekat solidaritas sosial (Malešević, 2004). Dalam realitas pedesaan Indonesia, kedua perspektif tersebut tidak berjalan secara terpisah, tetapi justru saling bertaut secara manipulatif. Elit menggunakan simbol budaya dan sentimen etnis sebagai alat instrumental untuk mempertahankan patronase, mengontrol sumber daya, dan memperkuat legitimasi kekuasaan mereka (Sjaf, 2019; de Archellie *et al.*, 2020). Oleh karena itu, tulisan ini menempatkan etnisitas sebagai arena negosiasi kekuasaan yang terkait erat dengan struktur oligarki lokal dan patronase historis.

Urgensi dan signifikansi studi ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana demokrasi lokal di Indonesia dapat mengalami pembajakan oleh elit melalui politik identitas dan penguasaan sumber daya. Studi ini penting karena memperlihatkan bahwa desentralisasi dan demokratisasi tidak secara otomatis menghasilkan distribusi kekuasaan yang lebih egaliter, melainkan sering kali memperkuat oligarki lokal berbasis patronase etnis (V. Hadiz, 2010; Winters, 2011). Selain itu, meningkatnya konflik agraria, perebutan Dana Desa, dan ekspansi industri ekstraktif di wilayah pedesaan menjadikan analisis mengenai relasi etnisitas dan penguasaan sumber daya semakin relevan (Peluso & Lund, 2011; T. M. Li, 2014). Dari sisi akademik, studi ini berkontribusi pada pengembangan sintesis teoritis antara Bapakisme klasik, Teori Elit, dan ekonomi-politik etnisitas dalam konteks mikro-pedesaan yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur sosiologi politik Indonesia. Dari sisi praktis, kajian ini dapat menjadi dasar refleksi kritis terhadap praktik demokrasi lokal, tata kelola desa, dan kebijakan pembangunan yang sering kali gagal mengatasi dominasi elit serta ketimpangan akses sumber daya. Dengan demikian, studi ini tidak hanya penting untuk memperkaya perdebatan akademik mengenai politik identitas dan oligarki lokal, tetapi juga relevan dalam merumuskan strategi pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis esai kritis dengan orientasi analisis ekonomi-politik melalui perspektif teori elit. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam relasi kuasa, dominasi elit, serta konstruksi sosial etnisitas dalam konteks masyarakat pedesaan Indonesia yang bersifat kompleks, historis, dan multidimensional. Dalam tradisi penelitian sosial kritis, pendekatan ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga membongkar relasi dominasi, hegemoni, dan praktik eksklusi sosial yang bekerja melalui struktur politik dan ekonomi lokal (Moleong, 1989; Creswell, 2014). Melalui metode esai kritis, penelitian menelaah berbagai artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen kebijakan untuk memahami bagaimana identitas etnis diproduksi, dimobilisasi, dan

digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan serta penguasaan sumber daya oleh elit lokal. Pendekatan ini relevan dalam studi ekonomi-politik pedesaan karena mampu menghubungkan dinamika mikro masyarakat desa dengan struktur oligarki yang lebih luas (V. Hadiz, 2010; Winters, 2011).

Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan mengintegrasikan teori elit, oligarki, patronase, dan sosiologi pedesaan. Kerangka analisis utama merujuk pada konsep *politicized culture* dari Siniša Malešević, teori oligarki dan patronase dari Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, serta konsep *Bapakisme* dari Leslie H. Palmier. Perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana etnisitas bertransformasi dari identitas kultural menjadi instrumen politik dalam perebutan akses terhadap tanah, sumber daya agraria, bantuan negara, dan kekuasaan lokal (V. R. Hadiz & Robison, 2012). Dalam konteks pedesaan Indonesia, relasi patron-klien dan struktur agraria menjadi arena penting reproduksi kekuasaan elit yang sering kali dibungkus melalui sentimen primordial dan solidaritas etnis (Sajogyo, 1982; Sjaf, 2019; Aspinall & Berenschot, 2019). Pendekatan ekonomi-politik juga memungkinkan penelitian membaca keterkaitan antara demokrasi lokal, elite capture, dan praktik klientelisme dalam pembangunan pedesaan (Bebbington *et al.*, 2013; Berenschot, 2018).

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi teoritis. Literatur yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema seperti etnisitas, patronase, oligarki, agraria, dan demokrasi lokal. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan *qualitative content analysis* untuk mengidentifikasi pola relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan elit dalam praktik penguasaan sumber daya pedesaan (Miles *et al.*, 2013; Krippendorff, 2018). Validitas argumentasi diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan literatur klasik dan kontemporer mengenai etnisitas, oligarki, dan pembangunan pedesaan di Indonesia (Denzin, 2012). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pembacaan kritis mengenai bagaimana etnisitas dikonstruksi sebagai instrumen politik dalam reproduksi kekuasaan dan akumulasi sumber daya di pedesaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Struktur Sosial Masyarakat Pedesaan Indonesia

Memahami struktur sosial masyarakat Indonesia secara fundamental harus dimulai dari analisis terhadap entitas pedesaan, mengingat Indonesia secara geopolitik dan sosiologis merupakan negara yang didominasi oleh corak agraris. Sekitar 73,14% desa di Indonesia memiliki tipologi pertanian, yang menegaskan bahwa bangunan sistem sosial nasional adalah sistem pertanian (*agricultural system*) (Sjaf, 2019). Dalam diskursus sosiologi pedesaan, struktur sosial ini didefinisikan melalui keberadaan subjek yang disebut sebagai petani (*peasant*). Secara sosiologis, *peasant* digambarkan sebagai masyarakat yang tinggal di desa, mengolah lahan dengan bantuan tenaga kerja keluarga untuk memenuhi kebutuhan subsistensi, dan memiliki keterikatan kuat dengan komunitasnya (Williams, 1982; Sajogyo, 1982; Sjaf, 2019). Struktur ini didasarkan pada prinsip "dahulukan selamat" (*safety-first*) atau moral ekonomi yang mengutamakan kelangsungan hidup kelompok di atas akumulasi keuntungan individu (Sjaf, 2019).

Dalam perkembangan masyarakat pedesaan Indonesia, struktur sosial agraris tidak hanya dibentuk oleh relasi produksi dan penguasaan agraria, tetapi juga oleh proses akulturasi dan asimilasi budaya yang berlangsung secara historis. Mobilitas penduduk, transmigrasi, perdagangan lokal, serta interaksi antaretnis di desa-desa Indonesia telah menghasilkan bentuk-bentuk adaptasi sosial yang kompleks antara kelompok pendatang dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, akulturasi dipahami sebagai proses pertemuan dua kebudayaan yang menghasilkan penyesuaian tanpa menghilangkan identitas asli masing-masing kelompok, sedangkan asimilasi mengarah pada peleburan identitas sosial dan budaya ke dalam sistem sosial dominan (Koentjaraningrat, 2002). Pada masyarakat pedesaan, proses tersebut tampak dalam praktik gotong royong, pola pertanian, bahasa sehari-hari, hingga sistem kekerabatan yang mengalami negosiasi sosial secara terus-menerus. Studi mengenai masyarakat multietnis di pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa integrasi sosial sering kali dibangun melalui hubungan ekonomi agraris dan patronase lokal yang memungkinkan kelompok etnis berbeda membentuk solidaritas berbasis

kepentingan ekonomi dan keamanan sosial (Geertz, 1963; Acciaioli, 2001). Namun demikian, proses akulturasi dan asimilasi tidak selalu berlangsung secara egaliter, karena dalam banyak kasus kelompok dominan tetap mempertahankan kontrol terhadap akses tanah, sumber daya desa, dan struktur kekuasaan lokal melalui mekanisme budaya maupun simbolik (Davidson et al., 2010; T. M. Li, 2014).

Akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat pedesaan Indonesia juga berkaitan erat dengan reproduksi struktur patron-klien dan dominasi elit lokal. Dalam banyak komunitas desa, integrasi kelompok pendatang sering kali berlangsung melalui mekanisme subordinasi terhadap elite desa atau tokoh adat yang berperan sebagai mediator sosial dan ekonomi. Kondisi ini menciptakan pola integrasi yang bersifat hierarkis, di mana penerimaan sosial terhadap kelompok baru bergantung pada kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan norma lokal dan jaringan patronase yang telah mapan (Aspinall & Berenschot, 2019). Pada saat yang sama, proses asimilasi dapat menjadi instrumen politik untuk memperkuat hegemoni kelompok dominan melalui pembentukan identitas kolektif desa yang tampak harmonis, tetapi sesungguhnya menyembunyikan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria dan akses politik. Dalam perspektif ekonomi-politik, integrasi budaya di pedesaan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan akumulasi modal, kontrol atas tanah, dan stabilisasi kekuasaan elit lokal (V. R. Hadiz & Robison, 2012). Oleh karena itu, akulturasi dan asimilasi di desa Indonesia bukan sekadar proses kebudayaan, melainkan bagian dari dinamika struktural yang mereproduksi relasi kuasa antara elite, petani kecil, dan kelompok marginal dalam sistem sosial agraris Indonesia (Lee Peluso et al., 2008; T. M. Li, 2014).

Struktur sosial pedesaan Indonesia tidak bersifat homogen, melainkan memiliki stratifikasi yang sangat jelas berdasarkan penguasaan sumber daya agraria. Berdasarkan pemikiran Sajogyo (1982), struktur sosial desa terbagi menjadi tiga lapisan utama: pertama, petani kaya atau pengusaha pertanian yang memiliki lahan luas (di atas 0,5–1 ha); kedua, petani gurem yang memiliki lahan sangat sempit (di bawah 0,5 ha); dan ketiga, buruh tani yang sama sekali tidak memiliki lahan dan menggantungkan hidup dengan bekerja di lahan orang lain. Di wilayah Jawa dan Sumatra, ketimpangan ini terlihat sangat tajam; sebagian kecil petani kapitalis menguasai lahan yang luas, sementara jutaan rumah tangga tani lainnya terjebak dalam kategori gurem atau tunakisma (Habibi, 2025). Stratifikasi ini menciptakan asimetri kekuasaan yang mendalam di desa, di mana kepemilikan tanah menentukan status sosial, prestise, dan kapasitas politik individu dalam komunitas (Sajogyo, 1982).

Selain stratifikasi berbasis lahan, struktur sosial Indonesia ditandai oleh fenomena "Bapakisme" atau patronase yang kuat. Palmier (1955) mengidentifikasi bahwa loyalitas masyarakat sering kali tidak ditujukan kepada institusi formal negara, melainkan kepada kepribadian pemimpin tertentu (*personalities*) yang dianggap sebagai "Bapak". Relasi patron-klien ini meluas dari tingkat desa hingga pusat kekuasaan, menciptakan jaringan vertikal di mana massa rakyat menggantungkan perlindungan hidupnya kepada elit pelindung sebagai ganti atas loyalitas politik mereka. Struktur ini diperkuat oleh nilai-nilai budaya yang menekankan kepatuhan (*culture of deference*), yang dalam banyak kasus mematikan inisiatif mandiri warga desa dan menempatkan mereka dalam posisi submisif terhadap kehendak elit (Palmier, 1955).

Perbedaan struktur sosial ini kemudian tercermin dalam ketimpangan tata kelola sumber daya yang mengakibatkan konflik antara masyarakat lokal dengan korporasi besar. Konflik yang terjadi disebabkan adanya tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan hak atas tanah, dan praktik monopoli pengelolaan lahan (Rahman, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Sudaryo Putra et al., 2025) membuktikan bahwa konflik vertikal sengketa lahan yang terjadi di Desa Batu Mila, Sulawesi Selatan disebabkan adanya perbedaan status sosial antara masyarakat lokal dan perusahaan negara, yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV. Konflik ini terjadi dikarenakan dua faktor utama, yaitu tumpang tindih kepemilikan lahan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat akibat aktivitas perusahaan. Masyarakat menilai status kepemilikan lahan tidak jelas karena perusahaan memiliki hak pengelolaan lahan berdasarkan rekomendasi perpanjangan HGU dari pemerintah dan seharusnya lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat setelah masa HGU berakhir pada tahun 2003. Kurangnya transparansi informasi dari pihak perusahaan dan pemerintah mengenai status hukum lahan juga turut memperburuk perbedaan persepsi tersebut.

Sebagian besar masyarakat tidak memiliki dokumen resmi yang menguatkan klaim kepemilikan mereka, sementara perusahaan berpegang pada legalitas administratif yang dikeluarkan pemerintah. Tidak hanya itu, masyarakat juga kehilangan penghasilan akibat penggusuran lahan yang mereka kelola. Masyarakat yang sudah bergantung sepenuhnya pada pertanian untuk bercocok tanam, kini lahan tersebut tidak lagi dapat diakses. Akibatnya, masyarakat harus kehilangan sumber mata pencaharian yang kemudian berdampak pada aspek sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran dan berkurangnya ketahanan pangan keluarga.

Analisis Teori Elit Dalam Fenomena Ekonomi-Politik Pedesaan

Melalui semua manifestasinya, para teoretikus elit berasumsi bahwa masyarakat dapat direpresentasikan dalam model vertikal metaforis: dengan elit di puncak, massa di bawah, dan semacam sub-elit yang tidak jelas di tengah. Elit selalu merupakan minoritas, sehingga model tersebut menjadi sebuah piramida (Woods, 1998). Dorongan abadi manusia berusaha untuk mengamankan kekuasaan dan status elit melalui *'the struggle for pre-eminence'* (Mosca, 1939), yang berarti bahwa hierarki dan stratifikasi sosial merupakan ciri penting dan tak terhindarkan dari kehidupan sosial dan politik. Elit mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan kekerasan atau melalui formula legitimasi (hukum, kebijakan, ideologi) yang belum tentu selaras dengan motivasi sebenarnya. Teori elit berupaya menjelaskan kecenderungan manusia untuk merasionalisasi tindakan dan pemikiran irasional secara retrospektif melalui manipulasi, penipuan diri, dan propaganda, tetapi juga agenda dan kebijakan politik yang 'sah'.

Fenomena ekonomi-politik di pedesaan Indonesia saat ini dapat dijelaskan melalui Teori Elit, yang menekankan bahwa dalam setiap sistem sosial, sebuah minoritas yang terorganisir akan selalu mendominasi mayoritas yang tidak terorganisir. Di pedesaan Indonesia, kekuasaan terpusat di tangan aliansi strategis antara elit administratif (aparatur desa) dan elit ekonomi (penguasa lahan dan bisnis lokal). Malešević (2004) menegaskan bahwa etnisitas dan budaya sering kali dimanipulasi oleh para elit ini sebagai "sumber daya politik" (*political resource*) untuk melegitimasi kontrol mereka atas sumber daya materiil.

Strategi utama elit lokal dalam mempertahankan dominasi adalah instrumentalisasi etnisitas melalui narasi "putra daerah". Etnisitas di sini dipahami sebagai "budaya yang dipolitisasi" (*politicized culture*), di mana simbol-simbol identitas sengaja dibangkitkan untuk menciptakan mekanisme penutupan sosial (*social closure*) (Malešević, 2004). Tujuannya adalah untuk memonopoli akses terhadap aset publik, seperti alokasi Dana Desa dan konsesi sumber daya alam, serta menyingkirkan kelompok lain yang dianggap sebagai pendatang atau "liyan". Di tingkat pedesaan, praktik ini menciptakan apa yang disebut sebagai "Oligarki Mikro," di mana jabatan politik desa digunakan sebagai instrumen akumulasi modal pribadi melalui penguasaan proyek-proyek pembangunan desa (Habibi, 2025; V. R. Hadiz & Robison, 2012).

Implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa yang memberikan mandat anggaran besar (Dana Desa) justru sering kali terjebak dalam fenomena *Elite Capture*. Penelitian menunjukkan bahwa dana tersebut cenderung dikelola secara eksklusif oleh elit desa tanpa melibatkan partisipasi nyata dari warga kelas bawah (Antlöv *et al.*, 2016; Sjaf, 2019). Warga desa sering kali diposisikan hanya sebagai objek administratif, sementara data mengenai kekayaan dan potensi desa dikuasai sepenuhnya oleh perangkat desa, menciptakan asimetri pengetahuan yang menghambat pengawasan publik (Sjaf, 2019). Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh adanya aliansi antara elit lokal dengan korporasi transnasional dalam eksploitasi sumber daya alam, yang sering kali mengabaikan hak-hak agraria petani kecil demi kepentingan investasi skala besar—sebuah fenomena yang digambarkan sebagai ancaman "Agrokolonial".

Analisis Program Dana Desa di Indonesia melalui perspektif Teori Elit menunjukkan bahwa desain desentralisasi yang bertujuan mendorong pembangunan pedesaan secara partisipatif justru masih menghadapi persoalan kuat berupa *elite capture*. Program Dana Desa yang diluncurkan melalui Undang-Undang Desa No. 6/2014 merupakan salah satu inisiatif desentralisasi fiskal terbesar di dunia karena menyalurkan sumber daya langsung kepada lebih dari 80.000 desa otonom. Program ini diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selaras

dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta agenda desentralisasi nasional. Namun, implementasi program tersebut secara konsisten dibentuk oleh dinamika kekuasaan lokal, terutama pengaruh elit desa yang telah mengakar dan sering memonopoli proses pengambilan keputusan maupun alokasi sumber daya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai “elite capture” (Chatterjee & Pal, 2021; Lestari *et al.*, 2023). Dalam perspektif Teori Elit, kondisi ini memperlihatkan bagaimana kelompok kecil yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial mampu mendominasi proses pembangunan demi mempertahankan privilese mereka sendiri. Praktik patronase, klientelisme, dan lobi politik memperkuat dominasi tersebut sehingga distribusi manfaat pembangunan menjadi tidak merata dan berpotensi memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi di tingkat pedesaan. Dengan demikian, hubungan antara desentralisasi, perilaku elit, dan hasil pembangunan pedesaan menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas dan keadilan Program Dana Desa.

Desain desentralisasi dalam Program Dana Desa pada dasarnya memiliki potensi besar untuk mendemokratisasi pembangunan pedesaan, tetapi kuatnya praktik *elite capture* masih menjadi hambatan utama bagi terciptanya distribusi manfaat yang setara (Fritzen, 2007; Chatterjee & Pal, 2021; Lestari *et al.*, 2023; Y. Li *et al.*, 2023). Aktor-aktor elit yang didukung oleh praktik klientelisme dan lobi politik sering kali memonopoli pengambilan keputusan serta pengalokasian sumber daya, sehingga memperkuat ketimpangan pendapatan dan membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Meskipun penggunaan teknologi tata kelola digital (*digital governance*) dan program peningkatan kapasitas aparatur desa telah membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, langkah tersebut belum cukup efektif tanpa dukungan kerangka kelembagaan yang kuat dan mekanisme partisipatif yang inklusif. Bukti komparatif dari berbagai negara, termasuk Senegal, menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap konteks lokal lebih efektif dalam menyeimbangkan keterlibatan elit dengan pemberdayaan masyarakat secara luas. Dalam konteks Indonesia, hal ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan publik, transparansi data desa, dan partisipasi warga agar Dana Desa tidak terus menjadi arena reproduksi kekuasaan elit lokal, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial dan pembangunan pedesaan yang berkeadilan.

Analisis dari perspektif teori elit menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya agraria di Indonesia masih sangat ditentukan oleh warisan historis, ambiguitas hukum, serta kemampuan kelompok elit dalam memanipulasi kebijakan negara untuk mempertahankan dominasi mereka. Ketimpangan agraria yang berlangsung hingga saat ini tidak dapat dilepaskan dari struktur kolonial yang diwariskan ke dalam sistem negara pascakemerdekaan, kemudian direproduksi melalui jaringan patronase, klientelisme, dan praktik *elite capture* dalam tata kelola sumber daya agraria (Kontesa & Fernando, 2024). Dalam praktiknya, elit politik dan ekonomi memanfaatkan ketidakjelasan regulasi pertanahan, mekanisme hukum transisional, serta kelemahan institusi negara untuk melegitimasi penguasaan lahan dalam skala besar. Fenomena ini tampak dalam praktik *dispossession by archive*, yaitu penggunaan arsip dan dokumen kolonial yang secara formal tidak lagi berlaku, tetapi tetap digunakan sebagai instrumen legitimasi pengambilalihan tanah masyarakat melalui korupsi, manipulasi peradilan, dan *coercive state power* (Moyo, 2019; Kontesa & Fernando, 2024; Muntaqo *et al.*, 2025; Suhardiman *et al.*, 2026). Reformasi kebijakan seperti *Job Creation Law* juga menunjukkan pergeseran tata kelola agraria menuju orientasi pasar yang lebih menguntungkan korporasi besar dibanding petani kecil dan masyarakat adat. Dalam konteks pedesaan, patronase agraria tidak lagi hanya berbasis penguasaan tanah, tetapi juga melalui distribusi bantuan pertanian, akses pupuk, kredit, dan program pembangunan desa yang memperkuat ketergantungan petani terhadap elit lokal maupun nasional (Joshi & Mason, 2011; Hidayat *et al.*, 2020; Beg, 2021).

Desentralisasi yang semula diharapkan memperluas partisipasi masyarakat justru dalam banyak kasus memperkuat posisi elit lokal sebagai broker politik dan ekonomi dalam mengakses sumber daya negara. Elit desa memanfaatkan jaringan birokrasi, lobi politik, dan kelembagaan lokal untuk mengontrol distribusi program agraria dan kehutanan sosial, sehingga kelompok masyarakat seperti *Forest Farmer Groups* (FFGs) sering kali berubah menjadi perpanjangan kepentingan elit dan korporasi (Aspinall & Rohman, 2017; Purnomo *et al.*, 2022; Mahsun *et al.*,

2025; Saputra *et al.*, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal belum sepenuhnya mampu membongkar relasi kuasa oligarkis dalam tata kelola agraria. Meski demikian, aksi kolektif masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menantang dominasi elit. Penguatan organisasi petani, modal sosial komunitas, serta mobilisasi akar rumput terbukti mampu meningkatkan akses pasar, memperkuat advokasi hak tanah masyarakat adat, dan mendorong tata kelola sumber daya yang lebih inklusif (Jelsma *et al.*, 2017; Kontesa & Fernando, 2024; Nugraha *et al.*, 2021; Permadi & Winarti, 2026; Schäfer *et al.*, 2025). Bahkan, keterlibatan kelompok marginal seperti perempuan pedesaan dalam praktik pengambilan keputusan alternatif menunjukkan adanya potensi transformasi menuju model pembangunan agraria yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Oleh karena itu, teori elit memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami ketimpangan agraria di Indonesia sekaligus menegaskan pentingnya reformasi hukum, transparansi tata kelola, dan penguatan partisipasi masyarakat sebagai prasyarat menuju keadilan agraria yang berkelanjutan.

Hegemoni Elit dan Kondisi Massa yang Marginal

Struktur kekuasaan di desa menciptakan situasi di mana massa rakyat berada dalam kondisi pasif dan submisif. Elit menggunakan kombinasi antara kekuatan (*lions*) dan tipu daya (*foxes*) untuk menjaga stabilitas dominasi mereka (Malešević, 2004). Lebih lanjut lagi, Malešević menjelaskan bahwa tipu daya ini sering kali mewujud dalam bentuk pembenaran ideologis atau *derivations*, di mana kebijakan yang menguntungkan elit diklaim sebagai upaya demi "kesejahteraan desa" atau "identitas komunitas," sehingga meredam potensi resistensi dari bawah. Struktur "Bapakisme" Palmier tetap eksis karena elit desa bertindak sebagai perantara (*broker*) antara negara dan warga, di mana akses terhadap bantuan sosial atau program pemerintah sangat bergantung pada kedekatan personal dengan sang patron (Berenschot, 2018; Palmier, 1955).

Akibat dari hegemoni ini adalah terjadinya fenomena yang disebut Sajogyo (1982) sebagai *modernization without development*. Meskipun terjadi peningkatan penggunaan teknologi pertanian, input kimia, dan mekanisasi, kesejahteraan petani secara struktural tetap stagnan atau bahkan mengalami kemunduran (invulsi) (Sjaf, 2019). Petani terjebak dalam siklus ketergantungan pada input pabrikan dan pasar global yang dikendalikan oleh kekuatan kapital besar, sementara kapasitas sumber daya manusia mereka tidak diperkuat secara substansial. Kondisi ini memicu munculnya fenomena *lost generation* di pedesaan, di mana generasi muda kehilangan minat pada sektor pertanian akibat kemiskinan ekstrem dan marjinalisasi struktural, yang mendorong migrasi masif ke wilayah perkotaan (Sjaf, 2019; Sutopo *et al.*, 2025). Ketidakmampuan sistem pertanian desa untuk memberikan jaminan hidup yang layak bagi pemuda adalah konsekuensi langsung dari kegagalan reforma agraria dan dominasi elit atas lahan produktif.

Resolusi Hijau yang masuk ke Indonesia pada masa orde baru dalam program pembangunan pedesaan telah mengubah cara pertanian tradisional ke pertanian modern. Modernisasi ini ditandai dengan adanya penggunaan bibit unggul, penggunaan irigasi, penggunaan mesin-mesin, penggunaan pupuk maupun obat pemberantas hama. Perubahan pada aspek ekonomi juga tidak dapat dihindarkan. Program pembangunan ekonomi pedesaan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Kementerian Pertanian (2025) dalam melaporkan pada tahun 2024 Indonesia masih memiliki sebanyak 25,2 juta jiwa penduduk miskin dengan sebaran paling banyak di Pulau Jawa (52,49%), Pulau Sumatera (22,01%), Pulau Bali-Nusa (8,02%), Pulau Sulawesi (7,78%), Pulau Papua (4,49%), Pulau Kalimantan (3,70%), dan Pulau Maluku (1,51%).

Revolusi Hijau di Indonesia diturunkan dalam Program Bimbingan Massal (Bimas), yang tidak lepas dari adanya politik. Program ini dilaksanakan dengan sistem komando yang sangat ketat dan bersifat sentralis, serta kerjasama dengan perusahaan agribisnis internasional dalam bentuk impor bibit, pupuk, pestisida, serta penyediaan pangan. Moderasi pertanian yang terjadi hanya menyebabkan para petani kaya menjadi semakin kaya dan petani miskin menjadi semakin miskin, terutama bagi petani *gurem*. Pembangunan pertanian justru menciptakan kesenjangan sosial di pedesaan akibat bentuk fasilitas dan teknologi yang hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan menengah atas di pedesaan. Petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha, minim modal

pertanian, minim infrakstruktur pertanian, penggunaan alat-alat pertanian masih tradisional, bibit yang tidak berkualitas, tanah yang kurang subur karena dieksploitasi sebagai lahan pertanian tanpa pemupukan yang baik, kemampuan budidaya tanaman yang rendah, rawan terhadap gangguan hama/penyakit, serta pemasaran yang tidak jelas dan rentan terhadap permainan harga para tengkulak yang menyebabkan harga jual komoditi pertanian yang rendah, akan tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan (Gultom & Harianto, 2021).

Selain itu, program *food estate* yang dicanangkan di Indonesia turut berperan bagaimana kapitalisme global memperkuat kontrol perusahaan atas sumber daya pangan dengan cara menggabungkan perusahaan besar untuk memperluas dominasi pasar dan mengontrol distribusi secara global. Monopoli korporasi dalam sektor pangan oleh perusahaan multinasional yang menguasai benih, pupuk, pestisida, dan teknologi pertanian menciptakan ketergantungan petani lokal pada input pertanian yang mahal sehingga petani kecil tidak memiliki pilihan bahan membeli produk dari perusahaan-perusahaan besar dan hal ini akan mengurangi kemampuan petani untuk menggunakan benih lokal atau metode tradisional yang menghasilkan keberlanjutan sistem pangan lokal. Salah satu dampak signifikan dari monopoli korporasi adalah penurunan keanekaragaman hayati di sektor bahan lokal dengan penggunaan bendera rekayasa genetik yang diproduksi secara massal oleh perusahaan besar menghentikan varietas benih lokal yang lebih adatif terhadap kondisi geografis tertentu di Indonesia (Fauzan *et al.*, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara etnisitas, patronase, dan penguasaan sumber daya dalam struktur sosial pedesaan Indonesia memperlihatkan kuatnya peran elit lokal dalam membentuk arah pembangunan desa. Melalui perspektif Teori Elit, tulisan ini menunjukkan bahwa desa tidak hanya menjadi ruang produksi dan kehidupan sosial, tetapi juga menjadi arena perebutan sumber daya agraria, Dana Desa, legitimasi adat, dan akses kebijakan. Etnisitas dalam konteks pedesaan pascareformasi tidak lagi berdiri semata sebagai identitas kultural, melainkan telah dimobilisasi sebagai instrumen politik untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan kekuasaan. Patronase, hubungan kekerabatan, narasi putra daerah, serta praktik klientelisme memperkuat posisi elit dalam mengendalikan distribusi sumber daya. Akibatnya, demokrasi lokal sering berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya mampu membongkar ketimpangan struktural. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan pedesaan masih rentan terhadap reproduksi kekuasaan elit, sehingga transformasi desa memerlukan perubahan tata kelola yang lebih adil, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat luas.

Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian empiris berbasis studi lapangan di berbagai wilayah pedesaan untuk membandingkan pola relasi elit, etnisitas, dan penguasaan sumber daya dalam konteks sosial yang berbeda. Praktisi di lapangan, terutama pendamping desa, organisasi petani, koperasi warga, dan lembaga masyarakat sipil, perlu memperkuat pendidikan politik kritis, transparansi data desa, pengawasan partisipatif, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal agar warga tidak hanya menjadi objek pembangunan. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu memperkuat reforma agraria, memperbaiki mekanisme distribusi Dana Desa, mencegah elite capture, dan membangun sistem tata kelola desa yang terbuka, akuntabel, serta berbasis keadilan sosial. Kebijakan pembangunan pedesaan juga perlu menempatkan petani dan masyarakat desa sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan, sehingga akses terhadap tanah, sumber daya agraria, dan program pembangunan tidak lagi terkonsentrasi pada kelompok elit tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para akademisi, peneliti, dan praktisi yang kajian serta pemikirannya menjadi dasar penting dalam memahami relasi antara etnisitas, patronase, dan penguasaan sumber daya dalam struktur sosial pedesaan Indonesia. Penulis juga menghargai kontribusi berbagai pihak yang terus mendorong penguatan tata kelola desa yang adil, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat luas. Semoga artikel ini dapat

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian pedesaan, penguatan demokrasi lokal, serta perumusan kebijakan pembangunan desa yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Acciaioli, G. (2001). Grounds of Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion, and Nationalism in Violence Avoidance at the Lindu Plain, Central Sulawesi. *Indonesia*, (72), 81–114. <https://doi.org/10.2307/3351482>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 31–52. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>
- Barth, F. (1998). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Waveland Press.
- Bebbington, A. J., Hickey, S., & Mitlin, D. C. (2013). *Can NGOs Make a Difference?: The Challenge of Development Alternatives*. Zed Books Ltd.
- Beg, S. (2021). Tenancy and clientelism. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 186, 201–226. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.03.006>
- Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563–1593. <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>
- Bottomore, T. B. (1993). *Elites and Society*. Routledge.
- Chatterjee, S., & Pal, D. (2021). Is there political elite capture in access to energy sources? Evidence from Indian households. *World Development*, 140, 105288. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105288>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (2010). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- de Archellie, R., Holil, M., & Waworuntu, A. (2020). Indonesian local politics and the marriage of elite interests: Case study of elite democracy in Gorontalo. *Cogent Arts & Humanities*, 7(1), 1838090. <https://doi.org/10.1080/23311983.2020.1838090>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Dove, M. R. (1985). The Agroecological Mythology of the Javanese and the Political Economy of Indonesia. *Indonesia*, (39), 1–36. <https://doi.org/10.2307/3350984>
- Fauzan, M. R., Cahyani, A. D., & Malik, A. (2024). Ekonomi Politik Ketahanan Pangan : Konflik Kepentingan antara Korporasi dan Petani Lokal. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 175–188. <https://doi.org/10.52655/khg.v7i2.101>
- Fritzen, S. A. (2007). Can the Design of Community-Driven Development Reduce the Risk of Elite Capture? Evidence from Indonesia. *World Development*, 35(8), 1359–1375. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.05.001>
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. University of California Press.
- Gultom, F., & Harianto, S. (2021). Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 145–154. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579>

- Habibi, M. (2025). Who Owns the Indonesian Countryside? From Corporate Capital to Capitalist Farmers and Landlord Capitalists. *Journal of Agrarian Change*, 25(4), e12618. <https://doi.org/10.1111/joac.12618>
- Hadiz, V. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hadiz, V., Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2012). Political Economy and Islamic Politics: Insights from the Indonesian Case. *New Political Economy*, 17(2), 137–155. <https://doi.org/10.1080/13563467.2010.540322>
- Hidayat, R., Baratha, L. W., Pamungkas, T. S., & Mubarak, A. M. (2020). Agrobiotechnology at The Nexus between Clientelism and The State's Authority: The Indonesian Case. *E3S Web of Conferences*, 142, 06003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014206003>
- Higley, J., & Burton, M. G. (2006). *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Bloomsbury Academic.
- Jelsma, I., Slingerland, M., Giller, K. E., & Bijman, J. (2017). Collective action in a smallholder oil palm production system in Indonesia: The key to sustainable and inclusive smallholder palm oil? *Journal of Rural Studies*, 54, 198–210. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.005>
- Joshi, M., & Mason, T. D. (2011). Peasants, Patrons, and Parties: The Tension between Clientelism and Democracy in Nepal. *International Studies Quarterly*, 55(1), 151–175. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00639.x>
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Kontesa, E., & Fernando, Z. J. (2024). Reclaiming Our Roots: Agrarian Law's Battle Against Land Grabbing. *Lex Scientia Law Review*, 8(2), 945–984. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.10681>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Lee Peluso, N., Afiff, S., & Rachman, N. F. (2008). Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8(2–3), 377–407. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00174.x>
- Lestari, R. I., Wardono, B., Saptana, S., Wardhana, I. W., Indarto, I., & Budiati, Y. (2023). The Village Fund Program and Indonesia's 18 th Sustainable Development Goal: A Bibliometric and Content Study. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 18(11). https://www.researchgate.net/profile/Rohmini-Lestari/publication/376107438_The_Village_Fund_Program_and_Indonesia's_18th_Sustainable_Development_Goal_A_Bibliometric_and_Content_Study/links/660a670010ca86798733a4bb/The-Village-Fund-Program-and-Indonesias-18th-Sustainable-Development-Goal-A-Bibliometric-and-Content-Study.pdf
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- Li, Y., Qin, X., Sullivan, A., Chi, G., Lu, Z., Pan, W., & Liu, Y. (2023). Collective action improves elite-driven governance in rural development within China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 600. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02089-9>
- Mahsun, M., Kasyfilham, F., & Triantini, Z. E. (2025). Village–state relations in post-New Order Indonesia: Political lobbying, village grants and clientelism. *South East Asia Research*, 33(1), 32–48. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483161>
- Malešević, S. (2004). *The sociology of ethnicity*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Moyo, K. (2019). *Postcolonial Transitional Justice: Zimbabwe and Beyond*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351048200>
- Muntaqo, F., Mashudi, M., Pratama, A. D., Ilmi, A. R. F., & Rumesten, I. (2025). The Transformation of Land Law in Indonesia: From Commodification to Maqāsid and Social Justice. *Al-Ahkam*, 35(2), 287–312. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.25605>

- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Hasyim, A. W., & Roziqin, F. (2021). *Social capital, collective action, and the development of agritourism for sustainable agriculture in rural Indonesia*. https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4372255/Pages_001-012.pdf
- Palmier, L. H. (1955). Aspects of Indonesia's Social Structure. *Pacific Affairs*, 28(2), 117. <https://doi.org/10.2307/3035376>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Permadi, R., & Winarti, L. (2026). Enhancing Market Access for Smallholder Farmers in Indonesia: The Role of Managerial Capacity and Member Motivation in Collective Action within Farmer Groups. *Agris On-Line Papers in Economics and Informatics*, 4, 101–115. <https://doi.org/10.7160/aol.2025.170408>
- Purnomo, M., Hadiwiyono, E., Andriatmoko, N. D., Pariasa, I. I., Kustanti, A., & Faust, H. (2022). Transformation Role of Forest Farmer Group's (FFGs) in Indonesia from Development Agent to Brokering Project. *Sage Open*, 12(1), 21582440221082144. <https://doi.org/10.1177/21582440221082144>
- Rahman, A. (2023). Politik Agraria. Jambi: PT Salim Media Indonesia.
- Sajogyo, S. (1982). Modernization without development in rural Java. *Journal of Social Studies*. <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/19821891979>
- Saputra, I., Faturachmat, F., Muin, A. V. F., Sirimorok, N., & Sahide, M. A. K. (2025). Sequencing the political forest: Power, exclusion, and the corporate hijacking of social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 181, 103668. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103668>
- Schäfer, S., Syam, M., & Gogali, L. (2025). Living together beyond liberal democracy: Examples of local decision-making and managing resource extractivism in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1370828>
- Sjaf, S. (2017, March 15). *Jalan Kedaulatan Pangan*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/jalan-kedaulatan-pangan>
- Sjaf, S. (2019). *Involusi republik merdesa*. PT Penerbit IPB Press.
- Sudaryo Putra, H. T., Ramli At, M., & Syam, R. (2025). Dinamika Konflik Agraria dan Ketimpangan Tata Kelola: Studi Kasus Sengketa Lahan di Desa Batu Mila. *Journal of Peace, Security and Democracy*, 1(2), 49–73. <https://doi.org/10.63280/jpsd.v1i2.45967>
- Suhardiman, D., Berenschot, W., Bachriadi, D., Kurniadi, B., Safitri, H., & Hakim, R. M. (2026). Dispossession by archive: Contemporary land grabbing through colonial land deeds in Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, 53(3), 581–602. <https://doi.org/10.1080/03066150.2025.2517711>
- Sunito, M. A., Adiwibowo, S., Soetarto, E., A.Kinseng, R., & Foley, S. (2017). The Limit to Politics of Ethnicity? Migration and Upland Transformation in Central Sulawesi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i3.19396>
- Sutopo, O. R., Nilan, P., & Prastowo, F. R. (2025). Young People and Inequality in Indonesia. In *The Palgrave Handbook of Global Social Problems* (pp. 1–24). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68127-2_626-1
- Tadjoeddin, M. (2007). *A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development*. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:8bdaa5cb-0b04-48a5-8892-c15191dab0d5>
- Williams, G. (1982). Taking the part of peasants. In *Rural Development*. Routledge.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Winters, J. A. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 405–409. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1236653>
- Woods, M. (1998). Rethinking Elites: Networks, Space, and Local Politics. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 30(12), 2101–2119. <https://doi.org/10.1068/a302101>